

KERUGIAN MASYARAKAT AKIBAT PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL GENAP

WISNU DWIHUTOMO PUTRO MUJIONO, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
wisnudwihutomo@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *People in Jakarta have suffered losses due to the enactment of Traffic Restrictions with an Odd-Even System, where the enactment of these regulations has not been able to solve the problem of traffic congestion that occurs in Jakarta. As a result of traffic congestion in Jakarta, the community experiences losses in terms of expensive travel costs due to more fuel used, vehicle maintenance costs due to longer engine usage and unstable vehicle movements, medical costs due to high levels of gas emissions exposed from the impact of congestion, reduced income earned by workers due to sanctions or fines due to late arrival at the office. The DKI Jakarta government in dealing with congestion that occurs in Jakarta imposes traffic restrictions with an even odd vehicle number system. This has caused a new polemic for the community, with this regulation the level of congestion in Jakarta has not decreased significantly, and the community has a social impact where the community feels that their right to be able to use road facilities is limited without any compensation given such as a reduction in vehicle tax costs. This paper aims to understand the impact of even-odd rules that are enforced in Jakarta. with a normative juridical approach method, where this legal research emphasizes the examination of legal documents and library materials related to the subject matter. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. Based on the results of this study, it can be concluded that the odd-even legal policy has a detrimental impact on society and also affects the social situation in society, especially in DKI Jakarta, these rules need to be review.*

Keywords: *Traffic Restrictions, Odd-even, Congestion.*

Abstrak: Masyarakat di Jakarta mengalami kerugian akibat diberlakukannya Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap, dimana dengan diberlakukannya aturan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta. Akibat masih terjadinya kemacetan lalu lintas di Jakarta masyarakat mengalami kerugian baik biaya perjalanan yang mahal dikarenakan bahan bakar yang digunakan lebih banyak, biaya perawatan kendaraan karena penggunaan mesin yang lebih lama dan tidak stabilnya pergerakan kendaraan, biaya pengobatan dikarenakan tingginya tingkat gas emisi yang terpapar dari dampak kemacetan, berkurangnya penghasilan yang diperoleh pekerja karena dikenakan sanksi atau denda akibat terlambatnya tiba di kantor. Pemerintah Jakarta menangani kemacetan di Jakarta memberlakukan pembatasan lalu lintas dengan sistem nomor kendaraan ganjil genap. Hal ini menimbulkan polemik bagi Masyarakat, aturan ini tingkat kemacetan ini tidak mengalami penurunan, dan masyarakat mendapatkan dampak sosial dimana masyarakat merasa haknya untuk dapat menggunakan fasilitas jalan raya dibatasi, tanpa adanya kompensasi yang diberikan seperti pengurangan biaya pajak kendaraan atau kompensasi dalam bentuk lain. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dampak dari aturan ganjil genap yang di berlakukan di Jakarta, dengan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum ganjil-genap berdampak merugikan masyarakat dan juga mempengaruhi keadaan sosial dalam masyarakat khususnya di DKI Jakarta, perlunya peninjauan Kembali terhadap aturan tersebut.

Kata Kunci: Pembatasan Lalu Lintas, ganjil-genap, Kemacetan

A.Pendahuluan

Kemacetan lalu lintas memang merupakan masalah perkotaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Diketahui saat ini penduduk di Jakarta mengalami peningkatan tahun demi tahun, saat penelitian ini dibuat jumlah penduduk Jakarta mencapai 10.679.961 jiwa, dengan meningkatnya jumlah penduduk Jakarta juga mempengaruhi lonjakan mobilitas pada Masyarakat khususnya Masyarakat yang menggunakan transportasi kendaraan roda empat dan roda dua. Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap. Aturan ganjil genap adalah suatu sistem yang digunakan dalam beberapa negara atau wilayah untuk mengatur lalu lintas berdasarkan karakteristik bilangan ganjil (bilangan yang tidak habis di bagi dua) dan bilangan genap (bilangan yang habis di bagi dua). Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi di kota-kota padat penduduk. Kemacetan lalu lintas meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pengguna transportasi. Kemacetan lalu lintas akan berdampak pada masyarakat secara langsung baik berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial dalam masyarakat, dan berdampak pada kesehatan. kemacetan di Jakarta berdampak pada biaya transportasi menjadi mahal, dengan terjadinya kemacetan berdampak pada mobilitas kendaraan menjadi lama karena tidak bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu. Sehingga berdampak pada produktifitas pekerja. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mencatat sepanjang 2017 penjualan mobil mencapai 1,079 juta (Ruhyana, 2019). Angka itu naik 1,6% dari tahun sebelumnya, meningkatnya kendaraan di kota Jakarta menimbulkan kemacetan yang terjadi hampir di setiap ruas jalan di Jakarta.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data akan dikumpulkan analisis bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum terkait. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode penelitian normatif yuridis. Pengumpulan Bahan Hukum: Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu yang akan diteliti. Ini melibatkan membaca dan mempelajari undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penting untuk menyertakan bahan hukum yang terkini dan relevan. Identifikasi Norma Hukum: Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Norma hukum dapat berupa prinsip-prinsip, aturan, kewajiban, hak, atau larangan yang diatur dalam bahan hukum yang dikaji. Pengidentifikasian norma hukum ini dilakukan dengan memperhatikan teks hukum secara teliti dan mengidentifikasi implikasi hukum dari setiap ketentuan. Interpretasi Hukum: Setelah identifikasi norma hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma yang ada. Interpretasi hukum melibatkan pemahaman dan penafsiran teks hukum untuk memahami makna dan tujuan di balik ketentuan yang ada. Peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum yang relevan, seperti metode gramatikal, sistematis, sejarah, atau teleologis, untuk mengungkapkan makna norma hukum. Analisis Hukum: Setelah interpretasi hukum dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang telah diidentifikasi dan diinterpretasikan. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap implikasi hukum, konsekuensi, dan aplikasi norma hukum dalam konteks yang relevan. Peneliti akan menganalisis hubungan antara norma-norma hukum yang ada, memberikan argumentasi hukum, dan menyimpulkan kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh aturan ganjil genap terhadap pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang relevan dan memperkaya diskusi akademis tentang hubungan antara regulasi lalu lintas dan pembangunan ekonomi.

C.Hasil dan Pembahasan

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan aktifitas ekonomi, populasi penduduk yang tinggi menuntut mobilitas masyarakat yang tinggi juga. Ini merupakan dampak dari fasilitas transportasi umum yang masih belum memadai yang mengakibatkan banyak masyarakat di kota Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), ada sekitar 13 juta sepeda motor dan 4,4 juta mobil di Jakarta pada tahun 2015. seperti yang terjadi pada daerah Tambun menuju Jakarta, kecepatan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 55,42%, sedangkan jumlah penurunan volume kendaraan terkecil yaitu sebesar 12,45% (Gunarti, 2020). hanya sekitar 20% perjalanan di Jakarta dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan transportasi umum. hal ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi. Belum lagi pemerintah mengeluarkan program kendaraan bermotor roda empat yang harganya terjangkau, Semakin banyaknya kendaraan yang ada di Jakarta membuat infrastruktur jalan mejadi terbatas dan tidak memadai di Jakarta menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kepadatan kendaraan. Jumlah jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada menyebabkan kemacetan lalu lintas, kebijakan pengelolaan lalu lintas yang diterapkan di Jakarta bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara. Bagian ini menyajikan tinjauan teoritis dan literatur mengenai dampak aturan ganjil genap terhadap aspek ekonomi, sosial, dan Kesehatan pada masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang setuju maupun tidak setuju dengan ada nya sistem Ganjil-Genap ini, bagi masyarakat yang melanggar aturan ini akan di tindak tilang, dari hasil penelitian di lihat dari teori yang sudah ada dapat di lihat bahwa semua kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangan (Putra, 2019). Aturan ganjil genap diterapkan bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Perspektif teoritis menunjukkan bahwa dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi berdasarkan angka nomor kendaraan ganjil dan genap, dengan aturan ini berpotensi mengurangi jumlah kendaraan di jalan, sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas. Literatur tentang subjek ini memberikan temuan yang bervariasi, menunjukkan pengurangan kemacetan jangka pendek selama penerapan aturan ini dan tantangan dalam mencapai pengelolaan kemacetan jangka panjang akibat berbagai faktor seperti kapasitas transportasi umum yang terbatas dan kendala infrastruktur. Aturan ganjil genap juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta dengan mengurangi emisi kendaraan. Kerangka teoritis menunjukkan bahwa aturan ini dapat berkontribusi pada penurunan tingkat polutan dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan akibat aktivitas kendaraan bermotor. Literatur yang mengkaji kualitas udara dalam hubungannya dengan aturan ganjil genap mengungkapkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa penelitian menunjukkan perbaikan sementara selama penerapan aturan ini, sementara yang lain menyoroti perlunya langkah-langkah pelengkap seperti promosi kendaraan listrik, peningkatan sistem transportasi umum, dan penanggulangan sumber polusi lainnya untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Tekanan psikologi akibat kemacetan membuat para pekerja saat berkendara ke tempat kerja mendapatkan tekanan secara psikologis akibat kemacetan di jalan Jakarta. Berdasarkan survei, diketahui 80% pekerja mendapatkan tekanan secara psikologis untuk menuju ke tempat kerja atau menuju ke rumah, banyak waktu yang terbuang yang dirasakan oleh para pekerja. Pekerja

Memahami persepsi publik dan kepatuhan hukum sangat penting untuk kesuksesan aturan ganjil genap. Perspektif teoritis menekankan pentingnya kesadaran publik, pendidikan, dan keterlibatan dalam membentuk sikap positif terhadap aturan tersebut. Literatur mengenai persepsi publik dan kepatuhan di Jakarta menyoroti faktor-faktor seperti kampanye kesadaran publik, aksesibilitas dan kehandalan pilihan transportasi alternatif, langkah-langkah penegakan hukum, dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik melalui strategi komunikasi yang efektif dan inisiatif yang ditargetkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan mendukung kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting karena berperan penting dalam memastikan stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Kesadaran hukum membantu masyarakat memahami aturan dan norma yang mengatur perilaku, ini membantu

mencegah konflik dan kekacauan sosial, karena individu dan kelompok tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mereka lebih cenderung patuh terhadapnya. Hal ini mengurangi pelanggaran hukum dan membantu mencegah tindakan kriminal. Kesadaran hukum memastikan bahwa individu memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setiap individu memiliki akses yang sama ke sistem peradilan. Kesadaran hukum memberdayakan individu untuk melibatkan diri dalam proses hukum dan berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Dengan memahami hak-hak hukum, individu dapat melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain. Kesadaran hukum yang tinggi membantu menciptakan iklim bisnis yang stabil dan memungkinkan kontrak dan transaksi ekonomi untuk dijalankan dengan baik. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, mereka lebih cenderung memiliki kepercayaan pada sistem hukum mereka. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial. Kesadaran hukum memungkinkan individu dan kelompok untuk menyelesaikan konflik mereka melalui jalur hukum daripada melalui kekerasan atau tindakan ilegal lainnya. Ini berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas sosial.

Diskusi teoritis menunjukkan bahwa mengurangi kemacetan dapat menghasilkan manfaat yang besar seperti peningkatan produktivitas, pengurangan konsumsi bahan bakar, dan waktu perjalanan yang lebih singkat. Namun, juga ada potensi biaya ekonomi, terutama bagi industri yang bergantung pada penggunaan kendaraan bermotor, seperti layanan transportasi dan bisnis yang melayani kendaraan bermotor. Literatur yang mengkaji dampak ekonomi aturan ganjil genap di Jakarta terbatas, namun menyoroiti perlunya penilaian komprehensif yang mempertimbangkan efek-efek pada sektor-sektor yang berbeda, lapangan kerja, dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan metode analisis dengan menggunakan LOS (*Level of Service*) atau tingkat pelayanan jalan yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang mejadi indikator dari kemacetan. Dari hasil analisis ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem ganjil-genap telah menyebabkan penurunan kemacetan. Kemacetan yang telah dijelaskan sebelumnya akibat banyak kendaraan yang melintas serta kapasitas jalan yang tidak cukup untuk menampung dapat di turunkan dengan adanya penerapan sistem ganjil-genap, namun penurunan yang ada tidak signifikan (Heru Widodo, 2020). Dari analisi di atas dapat kita ketahui bahwa aturan ganjil-genap tidak berdampak banyak bagi penurunan tingkat kepadatan lalu lintas di DKI Jakarta.

Kemacetan lalu lintas memiliki dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah kemacetan lalu lintas menyebabkan kerugian waktu perjalanan yang lebih lama bagi pekerja. Hal ini mengurangi efisiensi waktu kerja dan produktivitas secara keseluruhan, adapun tekanan psikologis dialami para pekerja dimana para pekerja jenuh menghadapi kemacetan yang terjadi, kemacetan yang terjadi juga merugikan masyarakat secara ekonomi. Kemacetan dapat meningkatkan pengurangan penghasilan bagi pekerja di bidang transportasi seperti taksi online, dan ojek, Para pekerja di sektor transportasi mengalami penurunan penghasilan dikarenakan tingginya komsumsi terhadap bahan bakar, dan menurunnya ritase angkutan atau jumlah penumpang yang diantarkan.

Kemacetan lalu lintas yang parah juga dapat menjadi faktor penghalang bagi investasi. Perusahaan mungkin enggan membuka cabang atau pabrik baru di daerah dengan kemacetan yang tinggi karena kekhawatiran terkait aksesibilitas, distribusi barang, dan biaya operasional yang tinggi. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kemacetan lalu lintas juga berkontribusi pada polusi udara, terutama emisi kendaraan. Polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk setempat dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Kondisi kesehatan yang buruk dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan biaya kesehatan. Untuk mengatasi dampak negatif kemacetan, diperlukan langkah-langkah penanganan kemacetan yang efektif, seperti pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai, peningkatan transportasi publik, pengaturan lalu lintas yang lebih baik, penggunaan teknologi transportasi cerdas, dan promosi kebijakan pengurangan kendaraan pribadi melalui aturan ganjil-genap atau insentif untuk penggunaan

transportasi berkelanjutan. Dengan mengurangi kemacetan lalu lintas, perkembangan ekonomi dapat didorong dengan lebih efisien, produktivitas dapat meningkat, dan biaya operasional dapat ditekan adalah harapan dari aturan ganjil-genap diterapkan. Namun yang terjadi dari aturan ini banyak kerugian yang dirasakan bagi masyarakat dan sector usaha yang menggunakan transportasi sebagai sarana angkutan usaha seperti yang terjadi pada sektor usaha logistic, yang menyebabkan mereka harus merubah jalur yang lebih jauh untuk menghindari jalanan yang menerapkan aturan ganjil-genap yang berpengaruh pada biaya bahan bakar, pada masyarakat umum yang menggunakan kendaraan pribadi juga terdampak akan aturan ganjil genap dikarenakan moda transportasi umum yang digunakan masih belum memadai. Banyak masyarakat yang pada akhirnya merasa rugi akan aturan ini dikarenakan masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi mejadi sulit untuk beraktifitas dengan menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat pada umumnya membeli kendaraan pribadi agar dapat mudah melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Hal ini menjadi terbatas karena aturan ganjil-genap, masyarakat merasa rugi telah membeli kendaraan pribadi demi efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pergerakan individu ataupun kelompok. Tidak adanya kompensasi yang di berikan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta terhadap aturan ini seperti pengurangan pajak kendaraan terhadap terbatasnya hak pengguna kendaraan dalam menggunakan jalan-jalan yang ada di DKI Jakarta. dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 216 ayat (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan hak kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk dapat menggunakan fasilitas jalan raya dengan memenuhi aturan tentang penggunaan jalan raya, dengan tidak membatasi penggunaan jalan raya pada hari tertentu, waktu tertentu, dan nomor kendaraan tertentu. Diberikan kebebasan pada kendaraan yang telah memenuhi syarat yang ada untuk dapat menggunakan jalan raya sesuai dengan klasifikasinya dan tidak terpaku pada aturan ganjil-genap.

Pada dasarnya faktor utama penyebab kemacetan adalah kapasitas jalan raya yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, tanpa ada pengembangan infrastruktur jalan raya yang memadai, fasilitas transportasi umum yang memadai, dan keseimbangan jumlah kendaraan yang ada di jalanan tidak akan berdampak banyak pada penurunan kemacetan di jalanan Jakarta.

D.Penutup

Banyak pro dan kontra akan aturan ganjil-genap, tidak keseluruhan masyarakat Jakarta setuju dengan sistem ganjil-genap yang di terapkan. Pro dan kontra terhadap aturan ganjil genap merupakan solusi dalam memecahkan masalah kemacetan, menurut penulis salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan Jakarta adalah dengan menerapkan Electronic Road Price (ERP), membatasi produksi jual atau jumlah kendaraan di Jakarta, meningkatkan kualitas dan memadai transportasi umum untuk masyarakat Jakarta dan daerah pinggiran penyangga. Tinjauan teoritis dan literatur menunjukkan bahwa aturan ganjil genap di Jakarta dapat memiliki dampak positif dan menantang terhadap pembangunan ekonomi. Sementara aturan ini berpotensi mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan kualitas udara, membentuk persepsi publik terhadap transportasi berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi, efektivitasnya tergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor ini meliputi integrasi langkah-langkah pelengkap, kapasitas sistem transportasi umum, kesadaran dan kepatuhan publik, serta pertimbangan yang cermat terhadap implikasi ekonomi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak jangka panjang aturan ganjil genap terhadap pembangunan ekonomi di Jakarta, dengan mempertimbangkan konteks kota tersebut dan tantangan unik yang dihadapinya.

Daftar Pustaka

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2

- (2019). doi:10.22437/ujh.1.2.363-392.
- Ekawati, Natalia Niken. "Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)." Brawijaya University, 2014.
- Fadhli, Muhammad Edo, and Heru Widodo. "Analisis Pengurangan Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil-Genap." *Planners Insight : Urban And Regional Planning Journal* 2, no. 2 (January 10, 2020): 036–041. doi:10.36870/insight.v2i2.136.
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022). doi:10.14421/sh.v11i1.2559.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Otje Salman, and Eddy Damian. *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan : kumpulan karya tulis. TA - TT -*. Ed. 1., Ce. Bandung SE -: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, 2002. doi:LK - <https://worldcat.org/title/53794279>.
- Perwitasaria, Erni Pratiwi, Tri Mulyani Setyowatib, and Sri Handayanic. "Dampak Kebijakan Perluasan Ganjil Genap Terhadap Jumlah Penumpang Dan Pendapatan Transjakarta." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 8, no. 1 (2021): 51–64.
- Putra, Arman Syah. "C." *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 3, no. 129 (2019).
- Rakhman, Muhamad Fauzi, Sri Nuryati, and Anita Setyowati Srie Gunarti. "Sistem Ganjil Genap Pada Pintu Tol Tambun Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Tol Jakarta-Cikampek." *FROPIL* 8, no. 1 (2020). doi:10.33019/fropil.v8i1.1704.
- Ruhyana, Nanang. "Analisis Sentimen Terhadap Penerapan Sistem Plat Nomor Gnajil/Genap Pada Twitter Dengan Metode Klasifikasi Naive Bayes." *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 3, no. 1 (2019).
- Sayuti, Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (December 1, 2018): 1–22. doi:10.30631/alrisalah.v13i02.407.
- Tamara, Sahniza, and Hadi Sasana. "Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Akibat Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Raya Bogor-Jakarta." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 2, no. 2 (2017): 185–96. file:///C:/Users/Jarvis/Downloads/529-1067-1-SM.pdf.